

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia menghadapi permasalahan serius dalam pengelolaan sampah yang semakin kompleks akibat pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi yang tinggi. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2023, total timbunan sampah nasional mencapai 69,7 juta ton, dengan sekitar 24% atau 16 juta ton sampah tidak dikelola dengan baik.

Hal ini menyebabkan berbagai dampak negatif, termasuk pencemaran lingkungan, peningkatan emisi gas rumah kaca, serta risiko kesehatan bagi masyarakat akibat sanitasi yang buruk. Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Indonesia meliputi kurangnya infrastruktur pengolahan sampah yang memadai, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah, serta lemahnya regulasi dan penegakan hukum terkait limbah domestik dan industri. Selain itu, masih banyak daerah yang bergantung pada sistem pembuangan akhir (TPA) tanpa adanya pengolahan lanjutan yang lebih ramah lingkungan.

Pengelolaan sampah di Indonesia memerlukan sinergi berbagai pihak, baik dari sektor pemerintah, masyarakat, swasta, maupun organisasi non-pemerintah (NGO). Pemerintah berperan dalam menyusun kebijakan, regulasi, serta menyediakan infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih baik. Namun, keterbatasan anggaran dan sumber daya menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut

Masyarakat memiliki peran penting dalam mengurangi produksi sampah, memilah sampah sejak dari sumber, serta berpartisipasi dalam inisiatif berbasis komunitas, seperti program bank sampah. Sementara itu, sektor swasta turut berkontribusi melalui inovasi pengolahan sampah dan penerapan model ekonomi sirkular yang mendukung keberlanjutan lingkungan. NGO juga memainkan peran strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat serta menginisiasi program berbasis komunitas, seperti kampanye pengurangan plastik dan pendirian bank sampah serta beberapa program terkait pemanfaatan sampah baik organik maupun non organik agar tidak berdampak pada pencemaran lingkungan.

Sejumlah program telah dikembangkan untuk mengatasi permasalahan sampah di Indonesia, di antaranya: Bank Sampah, Program yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan sistem ekonomi berbasis insentif. Saat ini terdapat lebih dari 10.000 bank sampah di seluruh Indonesia, meskipun kontribusinya baru mencapai 1,7% dari total pengelolaan sampah nasional. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Platform yang dikembangkan oleh KLHK untuk memantau produksi dan pengelolaan sampah di berbagai daerah. Data dari SIPSN pada tahun 2022 mencatat timbunan sampah nasional sebesar 21,1 juta ton dari 202 kabupaten/kota yang melaporkan. Kemitraan dengan Sektor Swasta, Pemerintah bekerja sama dengan perusahaan swasta dalam membangun infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih modern. Sebagai contoh, pemerintah Bali menggandeng perusahaan asal Tiongkok untuk membangun fasilitas insinerasi yang mampu mengolah hingga 1.500 ton sampah per hari.

Meskipun berbagai program telah dijalankan, tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah di Indonesia adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah sejak dari sumbernya. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi serta peningkatan kapasitas infrastruktur untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kota Bandung, sebagai salah satu kota besar yang menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat telah meningkatkan produksi sampah, namun sistem pengelolaan yang efektif belum terwujud. Akibatnya, permasalahan lingkungan dan sosial semakin kompleks.

Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara, serta berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan perekonomian lokal (WHO, 2018). Data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung (2023) menunjukkan bahwa jumlah sampah yang dihasilkan mencapai 1609,76 kg per hari, dengan komposisi sampah organik sebesar 60% dan sampah non-organik sebesar 40%, namun hanya sekitar 30% dari jumlah sampah tersebut yang dapat diolah dan dimanfaatkan kembali.

Kota Bandung telah mengimplementasikan berbagai program untuk menangani permasalahan sampah yang semakin kompleks. Seperti Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa): Setelah insiden longsornya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah di Cimahi yang menelan korban jiwa, Kota Bandung menghadapi kesulitan dalam pengelolaan sampah akibat keterbatasan lahan TPA yang memadai. Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah kota berencana membangun PLTSa sebagai alternatif pengolahan sampah yang dapat

menghasilkan energi listrik. Namun, hingga saat ini, proyek tersebut masih dalam tahap perencanaan dan belum terealisasi sepenuhnya.

Pembentukan Satgas ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam menanggulangi darurat sampah yang terjadi di Kota Bandung pada akhir 2023. Satgas Darurat Sampah Kota Bandung diluncurkan secara resmi pada Oktober 2023 sebagai respon terhadap penumpukan sampah yang terjadi akibat keterbatasan lahan TPA dan stagnasi pengelolaan sampah konvensional. Satgas ini melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan memperkenalkan sistem pelaporan berbasis digital melalui aplikasi Bandung Waste Reporting System. Sistem ini memungkinkan pelaporan dan pemantauan pengangkutan serta pemilahan sampah secara real-time. Berdasarkan laporan DLHK Kota Bandung per 12 Oktober 2023, intervensi Satgas berhasil menurunkan jumlah timbulan sampah secara signifikan, yaitu sebesar 70,14%, dengan detail pengumpulan meliputi 2,5 ton sampah organik, 2,3 ton sampah daur ulang, dan 1,9 ton sampah residu. Fakta ini menegaskan pentingnya upaya kolaboratif dan pendekatan sistemik dalam menyelesaikan krisis pengelolaan sampah di wilayah perkotaan.

Pembentukan Satgas ini juga memperlihatkan bahwa pemerintah mulai menyadari pentingnya pendekatan terstruktur, kolaboratif, dan berbasis komunitas dalam menangani krisis sampah. Dalam konteks inilah, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan melihat bahwa model pengelolaan berbasis komunitas seperti Program Zero Wasting Cities (ZWC) memiliki keunggulan dibandingkan pendekatan konvensional berbasis TPA. Pertimbangannya antara lain karena ZWC mendorong pengurangan sampah langsung dari sumbernya, mampu mengedukasi

masyarakat agar memiliki literasi lingkungan yang lebih baik, lebih hemat biaya karena tidak bergantung pada pengangkutan besar-besaran ke TPA selaras dengan visi Indonesia Bebas Sampah 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017.

Pemberdayaan Komunitas melalui Program Pemilahan Sampah: Selain upaya struktural, pemerintah kota juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui program pemilahan di sumber. Komunitas-komunitas lokal dilibatkan dalam inisiatif ini untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan warga dalam mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA. Namun, tantangan seperti biaya tinggi dan potensi dampak lingkungan dari metode pengolahan tertentu, seperti pembakaran sampah, masih menjadi perhatian utama.

Meskipun berbagai program telah dilaksanakan, Kota Bandung masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pengelolaan sampah, termasuk keterbatasan infrastruktur, kebutuhan peningkatan kesadaran masyarakat, dan penegakan regulasi yang lebih efektif. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diharapkan dapat mempercepat tercapainya solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan di masa mendatang.

Tjipta Lesmana (2017), mengemukakan pengelolaan sampah yang efektif harus melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan sampah. Teori ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam pengelolaan sampah, sehingga masyarakat dapat memiliki peran aktif dalam mengelola sampah dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Oleh karena itu, dukungan terhadap program-program berbasis pengurangan sampah dari sumber seperti ZWC menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang pemerintah dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, murah, inklusif, dan partisipatif. Program ZWC yang diinisiasi oleh masyarakat sipil dan organisasi lingkungan seperti Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan (YPBB) sejalan dengan visi pemerintah untuk menurunkan volume sampah ke TPA dan mendorong ekonomi sirkular di tingkat rumah tangga.

Program ZWC oleh YPBB di Kota Bandung menghadapi beberapa kendala dalam implementasinya. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti hambatan utama dalam program ZWC adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah sejak dari sumbernya. Banyak warga yang belum terbiasa dengan konsep zero waste, sehingga masih banyak sampah yang tidak terkelola dengan baik. Selain itu, keterbatasan infrastruktur pengolahan sampah menjadi tantangan besar, karena masih banyak daerah yang bergantung pada tempat pembuangan akhir (TPA) tanpa pengolahan lanjutan yang seharusnya dilakukan agar sampah tidak menumpuk.

Dari segi kebijakan, minimnya regulasi yang tegas dan sanksi membuat program ini sulit diterapkan secara optimal dan kurangnya koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas juga memperlambat perkembangan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan dana dan investasi menjadi tantangan dalam membangun fasilitas pengolahan sampah yang modern dan efisien. Untuk mengatasi hambatan ini, YPBB terus berupaya meningkatkan edukasi masyarakat, memperkuat kerja sama dengan pemerintah dan

sektor swasta, serta mengembangkan inovasi dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas agar program ini dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam menghadapi tantangan ini, Program ZWC bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang sistematis, terukur, menyeluruh, dan berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial. Tahapan utama dalam program ini meliputi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, penerapan pemilahan sampah dari sumber, pengolahan sampah terpilah melalui komposting dan daur ulang, penguatan infrastruktur serta kebijakan pendukung, serta monitoring dan evaluasi untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya.

Implementasi program menekankan pendekatan sosial dengan memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah serta menciptakan lapangan kerja berbasis ekonomi sirkular yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial warga setempat. Menurut George C. Edward III dalam Muhtar, dkk (2013) penelitian tentang implementasi program akan mencakup empat aspek, yaitu komunikasi yang efektif antara pemangku kepentingan dan masyarakat, ketersediaan sumber daya manusia, komitmen sosial dalam mendukung program, serta struktur birokrasi yang inklusif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ade Fia, Amin, Rasminto, dan Fetro Dola dengan judul “Analisi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Pada Wilayah Perkotaan di Indonesia” (2021) pengelolaan sampah di wilayah perkotaan Indonesia menghadapi tantangan besar, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya infrastruktur, dan lemahnya regulasi, penelitian ini menekankan pentingnya penerapan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) dalam

pengelolaan sampah untuk mencapai keberlanjutan. Selain itu, edukasi dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mengubah perilaku dalam mendukung pengurangan dan pengolahan sampah yang lebih baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Gama Pratama, Muallimin, Afwah, dan tim dengan judul “Upaya Modernisasi dan Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Desa Leuwimunding Majalengka” (2019) mengkaji sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Leuwimunding, Majalengka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas Bank Sampah. Selain itu, penelitian ini juga mengembangkan strategi inovatif yang dapat diterapkan di daerah lain untuk meningkatkan pengelolaan sampah secara lebih efektif dan efisien di bank-bank sampah lokal.

Penelitian oleh Farid Yusuf Nur Achmad dengan judul “Tantangan dan Peluang Implementasi Kebijakan Zero Waste di Kota Bau-Bau” (2022) mengevaluasi implementasi kebijakan Zero Waste di Kota Baubau. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan terbatasnya infrastruktur, serta peluang untuk berkolaborasi dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan Zero Waste dan menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti melakukan penelitian terkait Implementasi Program Zero Wasting Cities Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Berkelanjutan di Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan Kota Bandung,

karena adanya urgensi dalam mencari solusi yang efektif terhadap permasalahan sampah di kota Bandung melalui pendekatan Zero Wasting Cities yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Implementasi program ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan akibat sampah, tetapi juga untuk mengurangi dampak lingkungan akibat sampah, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat, ekonomi yang lebih kuat melalui model bisnis daur ulang, serta lingkungan sosial yang lebih harmonis.

Green Social Work dalam penanganan sampah di Indonesia berfokus pada pemberdayaan masyarakat, advokasi kebijakan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pekerja sosial berperan dalam edukasi lingkungan, membangun kesadaran masyarakat tentang pemilahan dan daur ulang sampah, serta mendorong regulasi yang mendukung pengelolaan limbah yang lebih efektif. Selain itu, mereka juga berperan dalam pengembangan program ekonomi sirkular dan kemitraan dengan sektor swasta. Menurut Kementerian Sosial RI (2020), pendekatan ini perlu diintegrasikan dalam pendidikan pekerjaan sosial untuk membentuk tenaga profesional yang kompeten dalam isu lingkungan dan kesejahteraan sosial.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan penelitian adalah “Bagaimana Implementasi Program Zero Wasting Cities di Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan Kota Bandung dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat berkelanjutan?”. Mengacu kepada pertanyaan diatas, pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan karakteristik Informan penelitian?
2. Bagaimana pelaksanaan komunikasi yang efektif antara pemangku kepentingan dan masyarakat ?
3. Bagaimana pelaksanaan ketersediaan sumber daya manusia dan finansial yang memadai?
4. Bagaimana pelaksanaan disposisi atau sikap dalam mendukung program?
5. Bagaimana pelaksanaan struktur birokrasi yang inklusif pelaksana?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Zero Waste Cities di Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan Kota Bandung dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat berkelanjutan. Secara khusus tujuan penelitian adalah untuk mengetahui :

1. Karakteristik Informan
2. Komunikasi yang efektif antara pemangku kepentingan dan masyarakat
3. Ketersediaan sumber daya manusia dan finansial yang memadai
4. Disposisi atau sikap dalam mendukung program
5. Struktur Birokrasi yang inklusif

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, di antaranya sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu kesejahteraan sosial serta memberikan kontribusi dalam pengembangan

pengetahuan ilmu pekerjaan sosial tentang peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam program kota tanpa sampah atau limbah.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi dan praktik pekerja sosial dengan bencana alam dan sosial khususnya menjadi referensi untuk memperdalam pengetahuan terkait peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam program kota tanpa sampah atau limbah.

#### **1.4 Sistematika Penelitian**

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penyusunan penelitian yang sudah disediakan dan ditetapkan oleh Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung. Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari :

**BAB I PENDAHULUAN** meliputi tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA** meliputi tentang teori- teori yang relevan dengan fokus permasalahan penelitian

**BAB III METODE PENELITIAN** meliputi tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar belakang penelitian, sumber data, cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisis data, jadwal dan langkah-langkah dalam penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** meliputi tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

**BAB V USULAN PROGRAM** meliputi tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya dan indikator keberhasilan.

**BAB VI SIMPULAN DAN SARAN** meliputi tentang simpulan dan saran dari penelitian.